



TINDAK LANJUT KESEPAKATAN KTT G-20 TAHUN 2015 DI TURKI

Sahat Aditua F. Silalahi*)

Abstrak

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 tahun 2015 yang dilaksanakan di Turki menghasilkan dua kesepakatan utama terkait dengan investasi dan transparansi data pajak, dan transaksi keuangan. Posisi Indonesia sendiri sangat strategis sehingga keberhasilan untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut akan meningkatkan kredibilitasnya sebagai anggota forum G-20. Tindak lanjut yang bisa dilakukan pemerintah adalah meningkatkan investasi ke sektor riil sekaligus mendorong pertumbuhan inklusif dari level ekonomi paling bawah. Sementara itu, DPR dan pemerintah harus mempersiapkan landasan hukum bagi pertukaran data pajak dan transaksi keuangan antara negara-negara anggota G-20 dengan melibatkan kalangan pengusaha dan perbankan agar implementasinya dapat berjalan lancar.

Pendahuluan

KTT G-20 yang dilaksanakan pada tanggal 15-16 November 2015 di Turki menghasilkan dua kesepakatan utama, yaitu: (1) rencana aksi investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan inklusif, dan (2) membuka informasi dan data perbankan termasuk pajak dan transaksi keuangan di antara negara-negara G-20. Kesepakatan ini dipandang vital dalam rangka menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dunia agar berkelanjutan.

Saat pembukaan konferensi, dalam pidatonya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat empat isu utama pada KTT G-20, yaitu: (1) target pertumbuhan ekonomi global sebesar dua persen dalam lima tahun ke depan; (2) reformasi struktur

keuangan dan kebijakan moneter dunia; (3) kenaikan suku bunga Bank Sentral AS (*the Fed*), dan (4) komitmen negara-negara G-20 atas kesepakatan penyisiran praktik pelarian *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) dan penghindaran pajak agresif dengan pertukaran data pajak dan transaksi keuangan secara otomatis dengan negara lain.

Posisi Indonesia sendiri cukup strategis di forum G-20 tersebut. Indikatornya adalah daya tahan Indonesia dalam menghadapi perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Indonesia menempati peringkat ketiga dalam hal pertumbuhan di antara negara-negara G-20 pada saat terjadi di tengah perlambatan

*) Peneliti Muda Kebijakan Publik pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. *Email*: sahatzilalahi81@gmail.com.



pertumbuhan ekonomi dunia. Oleh karena itu, isu yang disampaikan Jokowi memperoleh perhatian besar dalam forum KTT G-20 dan dianggap mampu untuk mewakili suara dari negara-negara berkembang.

Mengingat strategisnya posisi Indonesia, maka hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana kebijakan Pemerintah dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan yang dihasilkan dalam forum KTT Turki tersebut. Tindak lanjut tidak hanya dalam konteks untuk menguatkan terpenuhinya kepentingan ekonomi nasional, tetapi juga dapat menjadi contoh bagaimana anggota G-20 lainnya dapat menyikapi persoalan ekonomi global. Tulisan ini akan mengupas masalah: (1) empat isu yang diangkat pemerintah, dan (2) kebijakan pemerintah dalam menindaklanjuti kesepakatan KTT G-20.

Empat Isu Utama KTT G-20

Isu pertama yang diangkat pemerintah dalam KTT G-20 di Turki adalah target pertumbuhan ekonomi global sebesar dua persen dalam lima tahun ke depan. Saat ini perekonomian global tengah mengalami pelambatan sejalan dengan melemahnya kondisi perekonomian di negara maju pasca krisis hutang Yunani serta perlambatan perekonomian di Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan beberapa indikator perekonomian AS lainnya ternyata tidak mencapai target yang diharapkan sehingga berakibat pada kontraksi yang lebih dalam. Sementara itu di Zona Asia, perlambatan ekonomi dipicu oleh melemahnya sektor properti dan harga saham karena kekhawatiran terjadi gelembung ekonomi. Sedangkan di Kawasan Eropa, permasalahan hutang Yunani juga memberikan dampak luas kepada negara-negara Uni Eropa.

Di dalam negeri, tahun 2014 kembali menjadi tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian. Pemulihan terhadap dampak krisis ekonomi global memang berlangsung di berbagai negara ekonomi utama dunia. Namun laju pemulihan tersebut ternyata tidak merata terjadi di seluruh belahan dunia dan berada pada laju yang tidak sesuai harapan. Beberapa peristiwa yang turut memperlambat laju pemulihan tersebut, antara lain adalah

Argentina yang menyatakan *default* dalam pembayaran hutang, menguatnya ekspektasi akan kenaikan tingkat suku bunga AS, serta kejatuhan nilai tukar mata uang rubel Rusia menjelang akhir 2014. Peristiwa-peristiwa tersebut secara kumulatif membawa ketidakstabilan pada arus investasi ke dalam negeri dan membawa aliran modal lari ke luar negeri.

Sementara itu, isu kedua berkaitan dengan reformasi struktur keuangan dan kebijakan moneter global. Fenomena yang terjadi adalah struktur perekonomian global saat ini lebih dipengaruhi oleh sektor keuangan daripada sektor riil. Teori yang menyatakan volume uang beredar di sektor keuangan yang seharusnya mengikuti volume uang beredar di sektor riil tidak berlaku lagi seiring semakin bertambahnya instrumen investasi di sektor keuangan, bahkan semakin banyak bermunculan instrumen yang memiliki tingkat resiko tinggi.

Fenomena perubahan struktur keuangan juga sangat terkait dengan pertumbuhan teknologi informasi yang menyebabkan mesin-mesin produksi konvensional dipandang tidak lagi efisien bagi produsen yang juga merupakan penyumbang produk domestik bruto terbesar bagi sebuah negara. Dampaknya, efisiensi besar-besaran di hampir semua perusahaan yang beroperasi secara global dan akibatnya terjadi pengurangan tenaga kerja secara massal. Hal ini mengakibatkan semakin berkurangnya pendapatan masyarakat sehingga kecenderungan untuk berhutang semakin besar.

Kebijakan pengupahan menjadi kendala lain bagi penguatan struktur ekonomi nasional. Sebagaimana diketahui, setiap tahun selalu terjadi pertentangan antara serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam hal penentuan besaran upah pekerja. Hal ini berdampak kepada kurang kondusifnya iklim investasi terutama bagi perusahaan padat karya. Investor semakin enggan untuk lebih menanamkan modalnya hingga menyentuh sektor riil.

Isu ketiga terkait dengan ekspektasi pasar akan kenaikan tingkat suku bunga Bank Sentral AS, *the Fed*. *The Fed* sejak tahun 2008 sudah menahan tingkat suku bunga acuan di level nol persen yang membawa dampak mengalirnya arus modal

ke negara-negara dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi, termasuk Indonesia. Namun seiring dengan membaiknya perekonomian AS, *the Fed* berada dalam posisi untuk kembali menaikkan tingkat suku bunga acuan. Hal ini menyebabkan negara-negara berkembang dengan cermat mengantisipasi dampak dari kenaikan tingkat suku bunga *the Fed* tersebut, di antaranya adalah potensi keluarnya arus modal secara masif (*sudden reversal*).

Isu *sudden reversal* sudah lama menjadi perhatian pemerintah. Penguatan cadangan devisa secara tradisional menjadi instrumen untuk menahan arus pembalikan modal. Namun sangat disayangkan struktur cadangan devisa Indonesia saat ini sebagian besar masih dikontribusi oleh pinjaman luar negeri dan bukan dari ekspor. Posisi cadangan devisa per Oktober 2015 sebesar 100,71 juta dolar AS atau sudah turun sebesar 9,9 persen dibandingkan tahun 2014. Pengurangan cadangan devisa terutama bersumber dari aksi Pemerintah untuk menahan pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi sepanjang tahun 2015.

Sementara itu kinerja perdagangan Indonesia cenderung kurang mendukung usaha penguatan cadangan devisa nasional. Di satu sisi pertumbuhan industri non-migas pada tahun 2014 mencapai 5,61 persen atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 5,45 persen. Namun di sisi lain, peningkatan industri non-migas tidak diikuti oleh lepasnya ketergantungan terhadap impor bahan baku yang masih mencapai 64 persen dari total kebutuhan.

Namun demikian, Indonesia memperoleh kabar positif berupa perbaikan *outlook* peringkat investasi dari lembaga pemeringkat internasional *Standard and Poor's* (S&P). S&P meningkatkan *rating* investasi Indonesia dari stabil menjadi positif sehingga terdapat peluang untuk meningkatkan *rating* dalam 12 bulan ke depan menjadi *investment grade*. Dua lembaga pemeringkat internasional lainnya, yaitu *Fitch Ratings* dan *Moody's* telah terlebih dahulu menempatkan Indonesia pada posisi *investment grade* pada tahun 2014.

Isu keempat adalah komitmen negara G-20 atas kesepakatan penyesuaian praktik pelarian BEPS dan penghindaran pajak agresif dengan pertukaran data pajak

otomatis dengan negara lain. BEPS sendiri merupakan praktik yang banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional yang dengan sengaja memindahkan keuntungan perusahaan ke cabangnya di negara lain dengan tingkat pajak lebih rendah. Sebagai akibatnya, negara asal tempat beroperasi berpotensi untuk kehilangan pajak akibat dasar pengenaan pajak yang mengecil.

Komitmen ini pada awalnya dicetuskan pada pertengahan tahun 2013, dimana negara-negara anggota G-20, termasuk Indonesia, menyetujui rencana aksi BEPS dengan cara memperbaiki sistem pengawasan pelarian keuntungan perusahaan ke luar negeri. Selain itu, negara-negara anggota G-20 juga berkomitmen untuk menyediakan data yang transparan terkait pembayaran pajak perusahaan yang beroperasi lintas negara. Namun demikian, belum ada kesepakatan implementatif dalam rangka menyinergikan sistem pengawasan tersebut.

Tindak Lanjut Hasil Pertemuan

Hasil pertemuan dari KTT G-20 di Turki adalah rencana aksi reformasi struktural melalui paket kebijakan ekonomi yang akan ditempuh dengan strategi peningkatan investasi untuk pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih inklusif. Kebijakan pemerintah untuk mendukung strategi ini adalah dengan peningkatan kinerja sektor riil di mana arus modal harus lebih diarahkan ke sektor tersebut dengan penerbitan berbagai kebijakan dan mendorong iklim investasi. Sedangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, maka pemerintah harus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dimulai dari lapisan masyarakat paling bawah (dari desa) dan menggerakkan perekonomian berbasis usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga struktur perekonomian nasional akan lebih kokoh.

Kebijakan pemerintah sebagaimana dijelaskan di atas, pada gilirannya akan mampu untuk mendorong arus investasi untuk lebih lama berada di dalam sistem perekonomian Indonesia. Dampak positifnya adalah ketahanan sistem keuangan dalam negeri terhadap kenaikan suku bunga *the Fed* akan lebih tinggi karena arus investasi diarahkan ke sektor riil. Namun demikian,

penguatan cadangan devisa dengan jalan memacu ekspor non-migas dan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku harus tetap menjadi salah satu prioritas kebijakan pemerintah.

Kesepakatan dari KTT G-20 berikutnya adalah membuka informasi dan data perbankan termasuk pajak dan transaksi keuangan di antara negara-negara G-20. Implementasinya adalah dengan menjalankan instrumen *Automatic Exchange of Information* (AEOI) yang mewajibkan setiap perbankan mengintegrasikan informasi pajak dan transaksi keuangan dalam satu platform pertukaran informasi di antara negara-negara anggota G-20. Kesepakatan ini akan efektif berlaku pada tahun 2017. Untuk mewujudkan model pertukaran informasi tersebut tentunya pemerintah membutuhkan koordinasi lintas kementerian dengan melibatkan kalangan pengusaha dan perbankan.

Peran yang seharusnya dijalankan DPR adalah memastikan bahwa kebijakan pemerintah dapat sesuai dengan kesepakatan KTT G-20 sekaligus efektif dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Pengawasan DPR sangat diperlukan khususnya terkait penyaluran Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Desa agar dapat mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi inklusif. DPR bersama pemerintah juga harus mempersiapkan instrumen perundang-undangan sebagai landasan hukum pelaksanaan kesepakatan pertukaran informasi pajak dan transaksi perbankan di antara negara-negara G-20 yang akan berlaku efektif Tahun 2017.

Penutup

Mengingat posisi strategis forum G-20, keberhasilan dalam menindaklanjuti keputusan KTT tersebut akan meningkatkan kredibilitas Indonesia. Dalam hal mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil, maka pemerintah harus lebih mendorong investasi ke sektor riil. Sementara itu, untuk memperkuat struktur perekonomian nasional, maka pemerintah harus mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif

dengan melibatkan lapisan level ekonomi paling bawah dan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Terkait dengan komitmen pertukaran data pajak dan transaksi keuangan antar- negara-negara G-20, peran DPR dan pemerintah dalam mempersiapkan instrumen hukum beserta pelibatan dunia usaha dan perbankan akan sangat menentukan keberhasilan implementasi sistem tersebut.

Referensi

- "Perbanyak Sentimen Positif", <http://www.beritasatu.com/blog/tajuk/4118-perbanyak-sentimen-positif.html>, diakses tanggal 21 November 2015.
- "Posisi Cadangan Devisa 2005-2014", <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1313>, diakses tanggal 21 November 2015.
- "Hasil KTT G-20 Data Perbankan Terbuka Mulai 2017", <http://ekbis.sindonews.com/read/1062260/35/hasil-ktt-g20-data-perbankan-terbuka-mulai-2017-1447749428>, diakses 23 November 2015.
- "64% dari Industri Nasional Bergantung pada Bahan Baku Impor", <http://www.kemenperin.go.id/artikel/9306/64-dari-Industri-Nasional-bergantung-pada-Bahan-Baku-Impor>, diakses tanggal 21 November 2015.
- "4 Isu Utama yang Dibawa Jokowi ke KTT G-20", <http://bisnis.liputan6.com/read/2364925/4-isu-utama-yang-dibawa-jokowi-ke-ktt-g20>, diakses tanggal 23 November 2015.
- "Ekonomi RI Peringkat Tiga Besar di G-20", <http://finance.detik.com/read/2015/08/27/113636/3002715/5/ekonomi-ri-peringkat-tiga-besar-di-g20>, diakses tanggal 23 November 2015.
- Yulius Purwadi Herawan, "Legitimasi, Efektivitas, dan Akuntabilitas G-20 Sebagai Klub Eksklusif dalam Pembentukan Tata Kelola Ekonomi Global", *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Katholik Parahyangan*, Vol 8. (2), 2012.
- Kementerian Perindustrian, "Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2014", Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian, 18 Februari 2015.